

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

TAHUN 2023

JL. Palapa Nomor 11 Kupang 85111
Pos-el : diskominfo@nttprov.go.id,
posaduan.diskominfo@nttprov.go.id
Laman : www.nttprov.go.id, www.diskominfo.nttprov.go.id,
www.ppidutama.nttprov.go.id

Lembar Verifikasi Level 1 LKIP 2023
 Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Nusa Tenggara Timur

| No | Reviewer | Catatan/Koreksi |
|----|---|--|
| 1. | Fungsional Perencana Muda 30/01/2024 | 1. Verifikasi data realisasi dan data dukung 2. Verifikasi nilai capaian, realisasi target kinerja, belanja dan pendapatan |
| 2 | Sekretaris 31/01/2024 | 1. Koreksi Bab I, masukan pada pendahuluan ditambah dasar hukum penyusunan LAKIP 2. Dikoreksi data sarana Parasarana terutama kondisinya. |

Kupang, 31 Januari 2024,
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
 Pembina Tingkat I
 NIP. 197111115 200012 1 003

| Paraf Hierarki | |
|-----------------------------|----------|
| Sekretaris Dinas Kominfo | <i>h</i> |
| Perencana Ahli Muda | <i>p</i> |
| Analisis Data dan Informasi | <i>g</i> |

EKSEKUTIF SUMMARY

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di bangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah yang baik, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada akhir tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2022 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Bertolak dari kondisi faktual bahwa komunikasi dan informatika serta pelayanan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan sesuai pula dengan Visi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2018-2023 adalah “Nusa Tenggara Timur Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”, dan pada Misi ke V yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai suatu Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, melaksanakan program-program komunikasi dan informatika yang tertuang dalam RPJMD dan RENSTRA.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah “Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan Yang Ditugaskan Kepada Daerah”.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai Sasaran-Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah;
4. Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi;
5. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap capaian kinerja yang diperjanjikan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2023 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sepanjang Tahun 2023.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini disusun berdasarkan komitmen dan motivasi semua unit kerja, pimpinan dan ASN Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan perjanjian kinerja secara konsisten serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 ini bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, 31 Januari 2024,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

| Paraf Hierarki | |
|-----------------------------|--|
| Sekretaris Dinas Kominfo | |
| Perencana Ahli Muda | |
| Analisis Data dan Informasi | |

DAFTAR ISI

| | | |
|----------|---|----|
| BAB. I | PENDAHULUAN | 1 |
| A. | Latar Belakang | 1 |
| B. | Maksud dan Tujuan | 2 |
| C. | Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo | 2 |
| D. | Permasalahan dan Isu-isu Strategis | 10 |
| E. | Sistematika Penulisan LKIP | 13 |
| BAB. II | PERENCANAAN KINERJA | 15 |
| A. | Rencana Strategi Organisasi | 15 |
| 1. | Visi | 15 |
| 2. | Misi | 15 |
| 3. | Tujuan dan Sasaran | 15 |
| B. | Rencana Kerja (RKT) Tahun 2023 | 17 |
| C. | Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 | 18 |
| BAB. III | AKUNTABILITAS KINERJA | 20 |
| A. | Capaian Kinerja Organisasi | 20 |
| 1. | Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas | 21 |
| 2. | Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD | 22 |
| 3. | Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional | 23 |
| 4. | Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas | 24 |
| 5. | Permasalahan dan Solusi | 32 |
| 6. | Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 35 |
| 7. | Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja | 40 |
| B. | Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran | 49 |
| 1. | Pendapatan | 49 |
| 2. | Belanja | 50 |
| BAB. IV | PENUTUP | 62 |
| A. | Kesimpulan | 62 |
| B. | Saran – saran | 62 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Tabel Jumlah Asset Dinas Kominfo | 8 |
| 2 | Tabel Jumlah Perangkat Keras Komputer Dinas Kominfo | 9 |
| 3 | Tabel Jumlah Sarana Pendukung Dinas Kominfo | 9 |
| 4 | Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo | 10 |
| 5 | Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo | 16 |
| 6 | Tabel RKT Dinas Kominfo Tahun 2023 | 17 |
| 7 | Tabel PK Dinas Kominfo Tahun 2023 | 18 |
| 8 | Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Kominfo | 21 |
| 9 | Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD | 22 |
| 10 | Tabel Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional | 23 |
| 11 | Tabel Layanan Internet dan Jaringan Intranet Dinas Kominfo | 29 |
| 12 | Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 35 |
| 13 | Tabel Analisis Program/Kegiatan dan Anggaran Pencapaian Perjanjian Kinerja | 40 |
| 14 | Tabel Realisasi Pendapatan | 49 |
| 15 | Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja | 50 |
| 16 | Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | | | |
|----|--|-------|----|
| 1 | Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika | | 4 |
| 2 | Gambar Komposisi Status Kepegawaian | | 4 |
| 3 | Gambar Komposisi Jabatan PNS | | 5 |
| 4 | Gambar Komposisi Jabatan Struktural PNS | | 5 |
| 5 | Gambar Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan | | 6 |
| 6 | Gambar Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan | | 6 |
| 7 | Gambar Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan | | 7 |
| 8 | Gambar Komposisi PNS menurut Gender | | 7 |
| 9 | Gambar Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu | | 8 |
| 10 | Gambar Target dan Realisasi Jenis PAD Dinas Kominfo | | 49 |
| 11 | Gambar Target dan Realisasi Jenis Belanja Dinas Kominfo | | 51 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance*. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (*Performance-base Management*) yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sehingga setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka Reformasi Birokrasi (RB). Penguatan akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Oleh karena itu, implementasi SAKIP sangat penting untuk dilaksanakan oleh setiap pimpinan instansi Pemerintah di lingkungannya setiap tahun dalam rangka memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik di instansinya secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini berisi informasi tentang implementasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023, catatan hasil evaluasinya, dan rekomendasi untuk perbaikan implementasi Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja selama Tahun Anggaran 2023 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur) Tahun Anggaran 2023;
2. Deskripsi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;
3. Umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan ;
4. Sebagai penilaian terhadap Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

1. Tugas Pokok dan Fungsi :

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan informatika, statistik dan persandian yang tertuang dalam RENSTRA sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai **Tugas** sebagai berikut:

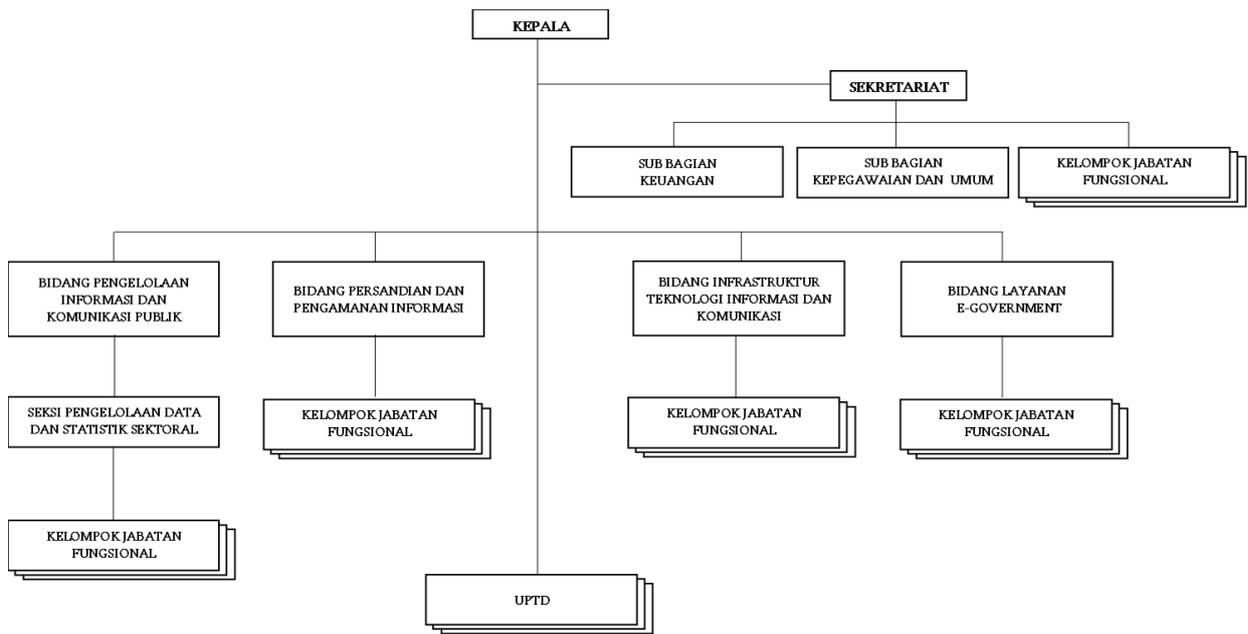
“Membantu Gubernur Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah”.

Dalam melaksanakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan **Fungsi** sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 (satu) orang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), 3 (tiga) orang Sub Bagian/Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut:

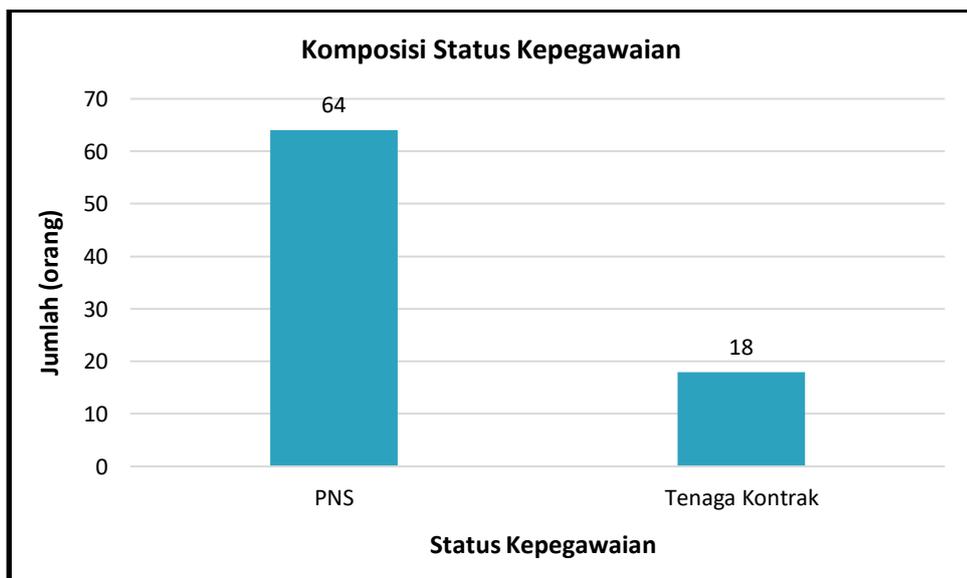


Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

3. Kepegawaian

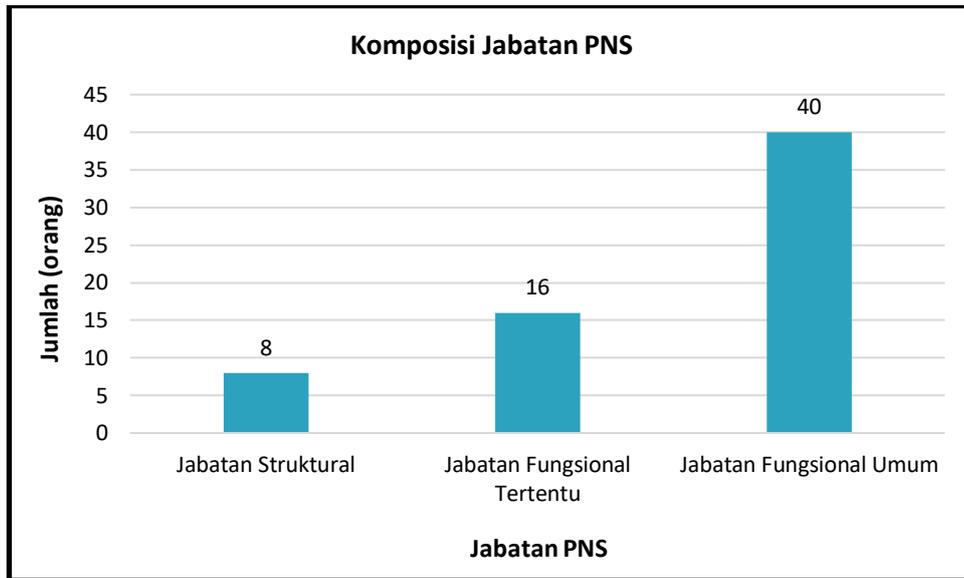
Jumlah ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 sebanyak 82 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian



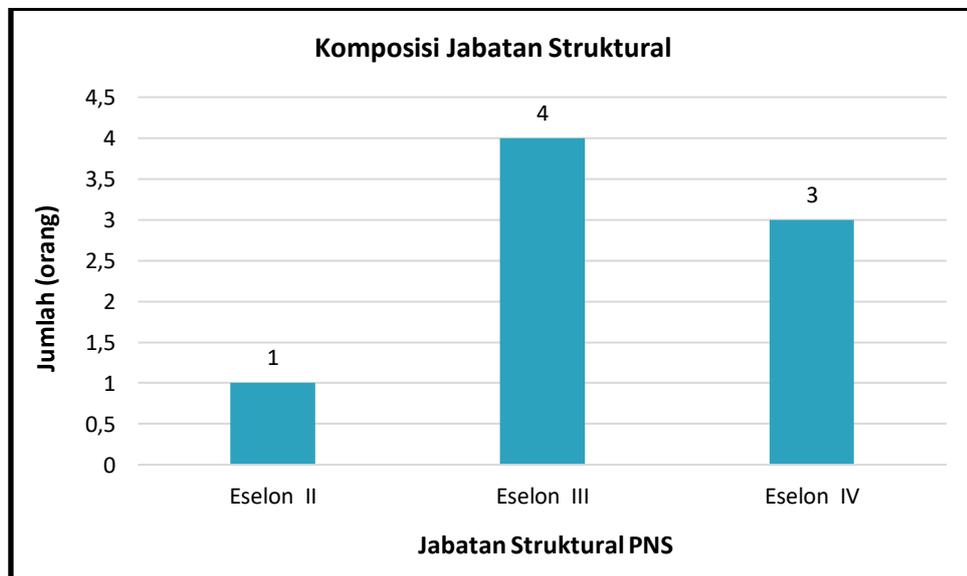
Gambar. 2
Komposisi Status Kepegawaian

b. Komposisi Jabatan PNS



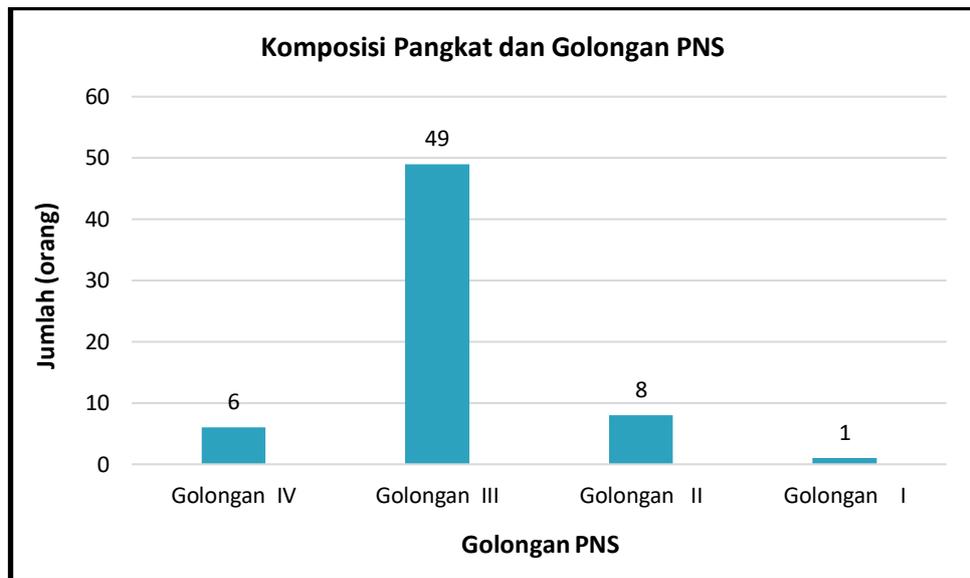
Gambar. 3
Komposisi Jabatan PNS

c. Komposisi Jabatan Struktural PNS



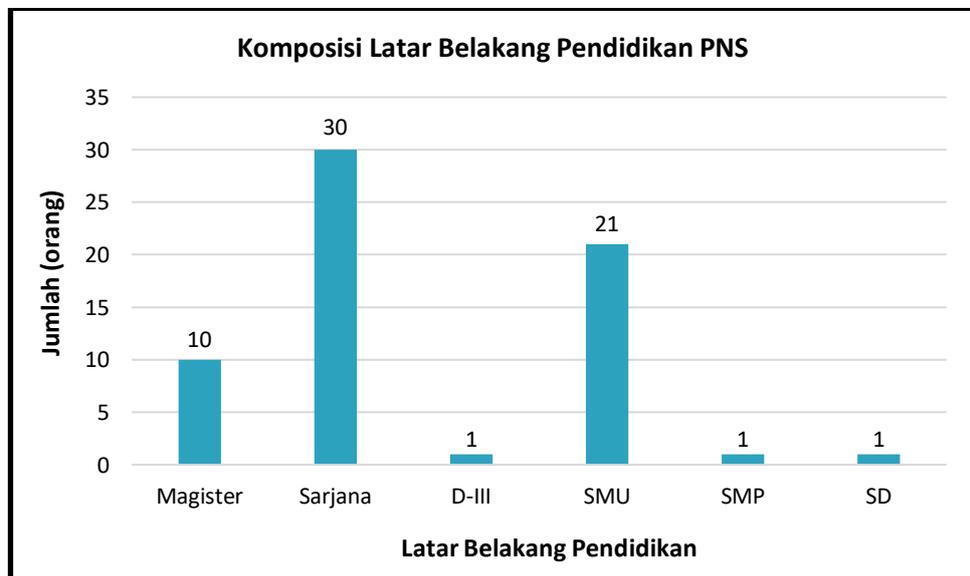
Gambar. 4
Komposisi Jabatan Struktural PNS

d. Komposisi PNS sesuai Pangkat dan Golongan



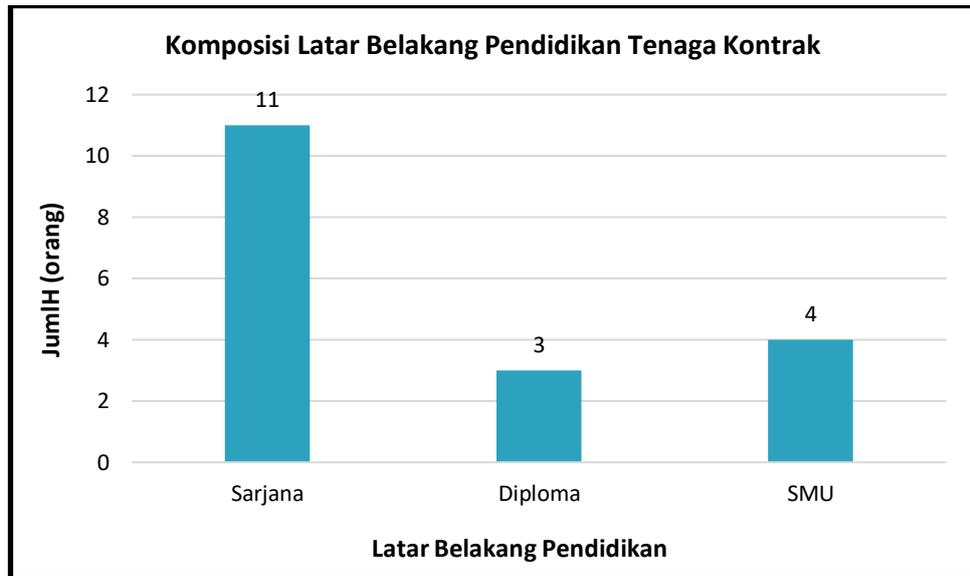
Gambar. 5
PNS sesuai Pangkat dan Golongan

e. Komposisi PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan



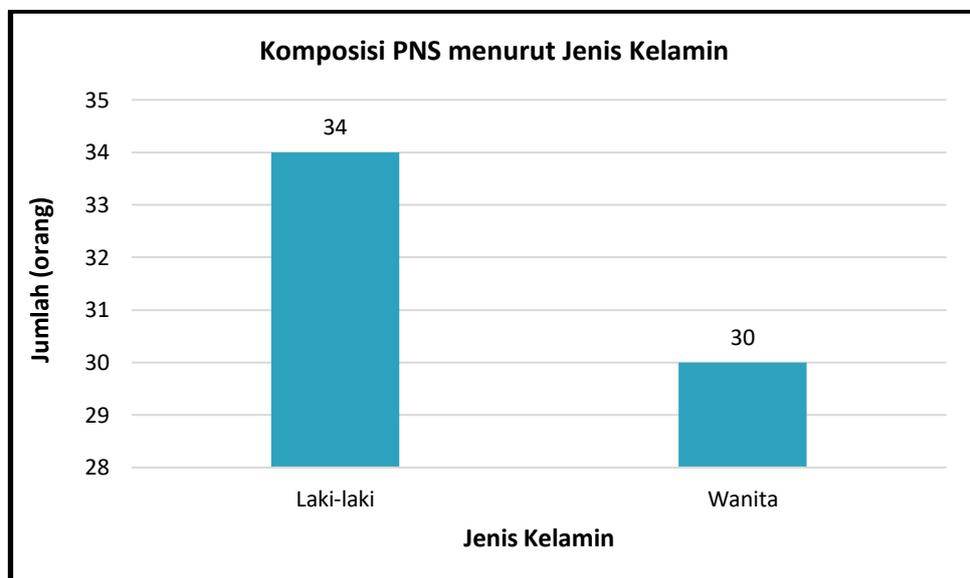
Gambar. 6
PNS sesuai Latar Belakang Pendidikan

f. Komposisi Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan



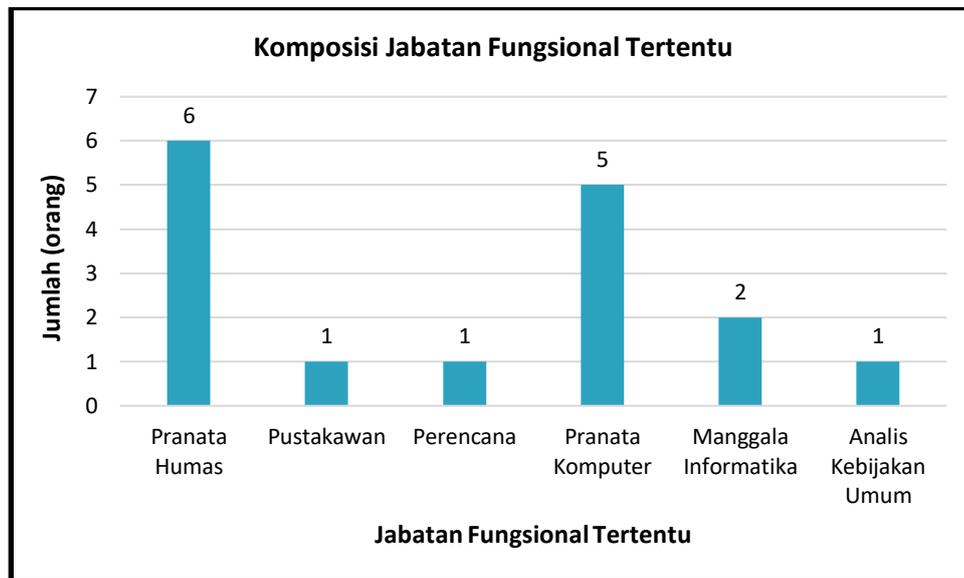
Gambar. 7
Tenaga Kontrak sesuai Latar Belakang Pendidikan

g. Komposisi PNS menurut Gender



Gambar. 8
PNS Menurut Gender

h. Jenis Pejabat Fungsional Tertentu



Gambar. 9
Komposisi Pejabat Fungsional Tertentu

4. Keadaan sarana prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT telah mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasarana perlu terus untuk ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas dan efisiensi kerja.

Tabel. 1
Jumlah Asset Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

| No | Pembidangan Barang | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|---------------------|--------|--------|-----------------------------|
| 1 | Tanah | 4 | Bidang | Sertifikat disimpan di BPAD |
| 2 | Alat-alat angkutan | 6 | Unit | Dalam kondisi baik |
| 3 | Bangunan gedung | 4 | Gedung | Gedung Kantor |
| 4 | Gedung Aula | 1 | Gedung | Ruang Rapat Objek PAD |
| 5 | Peralatan dan Mesin | 1 | Paket | |

Tabel. 2
Jumlah Perangkat Keras TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

| No | Jenis Perangkat | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|-----------------|--------|--------|------------|
| 1 | Server | 10 | Unit | Baik |
| 2 | PC/Komputer | 35 | Unit | Baik |
| 3 | Laptop | 18 | Unit | Baik |
| 4 | Printer | 17 | Unit | Baik |

Tabel. 3
Jumlah Sarana Pendukung TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

| No | Jenis Perangkat | Jumlah | Satuan | Keterangan |
|----|---------------------|--------|--------|------------|
| 1 | LCD | 3 | Unit | Baik |
| 2 | Kamera | 2 | Unit | Baik |
| 3 | Kamera Shoting | 1 | Unit | Baik |
| 4 | Web Camera | 3 | Unit | Baik |
| 5 | Kamera Drone | 1 | Unit | Baik |
| 6 | Handycam | 1 | Unit | Baik |
| 7 | Tripod | 1 | Unit | Baik |
| 8 | Monopod | 1 | Unit | Baik |
| 9 | Televisi | 3 | Unit | Baik |
| 10 | Scanner | 2 | Unit | Baik |
| 11 | Flash Kamera | 1 | Unit | Baik |
| 12 | Lensa Tele Tambahan | 1 | Unit | Baik |
| 13 | RAM Server | 3 | Unit | Baik |
| 14 | Resiver CCTV | 1 | Unit | Baik |
| 15 | Mesin Sidik Jari | 2 | Unit | Baik |
| 16 | Harddisk Eksternal | 5 | Unit | Baik |
| 17 | UPS | 19 | Unit | Baik |
| 18 | Mixer | 1 | Unit | Baik |
| 19 | Genset | 1 | Unit | Baik |

Demikian gambaran eksisting dukungan infrastruktur TIK, SDM dan prasarana pendukung lainnya sampai dengan kondisi tahun 2023.

D. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika maka permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pada masing-masing urusan adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|---|
| 1. | Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE Lingkup Pemerintah Provinsi | 1. Membangun dan mengembangkan aplikasi dan jaringan TIK yang belum didukung dengan jaringan LAN serta Fiber Optik (FO). | 1. Masing-masing Perangkat Daerah masih mengembangkan aplikasi secara parsial dan tidak terintegrasi. 2. Pembangunan aplikasi dan TIK belum memenuhi standarisasi TIK |
| | | 2. Aplikasi e-Government (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah dan belum terintegrasi. | 1. Belum tersedianya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai kerangka acuan dalam pengelolaan SPBE |
| | | 3. Pelaksanaan Keamanan Informasi belum memadai. | 1. Keamanan aplikasi: untuk setiap aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah belum menjamin kerahasiaan data karena dikembangkan oleh pihak ketiga demikian dengan keamanan sistem aplikasi yang dikembangkan. 2. Keamanan jaringan: dalam jaringan computer hal yang tidak boleh dilupakan adalah masalah keamanan jaringan dan keamanan data, apalagi sistem yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah masing-masing memiliki data yang sangat banyak. 3. Keamanan Lingkungan: kondisi yang digambarkan pada saat ini menunjukkan bahwa setiap Perangkat Daerah yang mempunyai aplikasi tidak memiliki keamanan yang baik karena tidak menyediakan ruangan server, UPS, AC ruangan, ataupun genset sebagai cadangan apabila PLN padam. |

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|--|--|
| | | 4. Terbatasnya SDM pengelola TIK. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah SDM TIK. 2. Terbatasnya kapasitas SDM TIK yang tersedia. 3. Kurangnya pengembangan kompetensi SDM TIK. |
| 2. | Belum optimalnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT | 1. Pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik belum dilaksanakan berbasis TIK. | <ol style="list-style-type: none"> 1. PPID yang seyogyanya berperan sebagai wadah untuk menyiapkan informasi publik baik berupa profil Perangkat Daerah, program, dan kegiatan serta capaian kinerja belum optimal mempublikasikan. 2. Proses komunikasi publik dan informasi publik yang seyogyanya juga dapat memanfaatkan kearifan lokal berbasis TIK sebagai media komunikasi dan informasi juga belum dapat dibentuk dan berperan secara optimal. |
| 3. | Belum optimalnya Pengelolaan Satu Data NTT | 1. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya integrasi data dikarenakan pembuatan aplikasi di Perangkat Daerah yang bermacam-macam platform. 2. Data masih tersebar di masing-masing Perangkat Daerah bersifat terpisah sehingga terjadi duplikasi dan perbedaan. 3. Sulitnya memperoleh data yang akurat dari Perangkat Daerah |

2. Isu-isu Strategis

a) Pembangunan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi NTT;

Untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, maka penentuan arah dan sasaran pembangunan daerah harus dilandasi oleh data dan informasi yang akurat. Untuk itu pengelolaan data dan informasi daerah harus difasilitasi secara terpadu dan terintegrasi dengan berbasiskan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dikelola sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

b) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Provinsi NTT akan dilayani berbasis elektronik. Layanan masyarakat yang semula secara manual secara bertahap akan dilayani secara elektronik. Implementasi e-Government perlu didorong terus agar semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya mencakup infrastruktur, konten, aplikasi dan sumber daya manusia.

c) Tuntutan Publik akan Keterbukaan Informasi dan Transparansi;

Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya. Hal ini selaras dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh badan publik untuk mengumumkan informasi publik secara serta merta, setiap saat dan berkala kepada masyarakat.

d) Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat melanda berbagai wilayah dan komunitas masyarakat, termasuk juga kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Bila tidak diantisipasi secara tepat tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat.

e) Keamanan Informasi SPBE;

Keamanan informasi menjadi isu strategis yang perlu segera direspon mengingat :

- Pembangunan dan pengembangan TIK pada Perangkat Daerah belum berbasis keamanan informasi.
- Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi;

Permenkominfo Nomor 4 tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi Pasal 7 mengatur :

- Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001 dan ketentuan pengamanan yang ditetapkan oleh Instansi Pengawas dan Pengatur Sektornya.
- Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik tinggi harus menerapkan standar SNI ISO/IEC 27001.
- Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

Berdasarkan peraturan ini maka sudah menjadi kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik strategis untuk mensertifikasian SNI ISO/IEC 27001 layanannya, dan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik rendah harus menerapkan pedoman Indeks Keamanan Informasi.

f) Peningkatan Infrastruktur TIK dan Pengintegrasian Data di Seluruh OPD.

Perkembangan di bidang TIK yang semakin maju, dan kebutuhan data dan informasi PD dilingkungan Pemerintah Provinsi NTT memerlukan sarana prasarana yang lebih efisiensi dan dijamin keamanannya (*security*) guna melakukan penyimpanan yang aman dari segala gangguan dalam lalu lintas data. Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, hampir semua PD telah memiliki dukungan jaringan TIK guna menunjang kegiatan operasional sehari-hari, meski demikian, inisiatif keberadaan fasilitas infrastruktur tersebut tidak serupa karena masing-masing instansi memiliki latar belakang yang berbeda-beda dalam mengembangkan sistem TIK-nya. Hal ini telah menyebabkan beberapa permasalahan antara lain :

- Pengembangan infrastruktur khususnya untuk sistem jaringan yang belum berbasis LAN dan FO kurang memperhatikan efektivitas dan efisiensi yang berskala nasional.
- Standar konfigurasi sistem jaringan di PD yang aman belum ada, sehingga masing-masing PD menyelenggarakan sistem jaringan TIK nya sendiri.

E. SISTEMATIKA PENULISAN LAKIP

Adapun Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dinas Komunikasi dan Informatika Provisi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

- ❖ **BAB I. PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
 - D. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - E. Sistematika Penulisan LKIP

- ❖ **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**
 - A. Rencana Stategi Organisasi
 - 1. Visi
 - 2. Misi
 - 3. Tujuan dan Sasaran
 - B. Rencana Kerja Tahun (RKT) Tahun 2023
 - C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

❖ BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas
2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD
3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional
4. Analisis Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas
5. Permasalahan dan Solusi
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

B. Realisasi Program/Kegiatan dan Anggaran

1. Pendapatan
2. Belanja

❖ BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran – saran

❖ Lampiran-lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGI ORGANISASI

1. VISI :

Visi merupakan pedoman bagi upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi sebuah organisasi, karena itu Pemerintah Daerah Provinsi NTT menetapkan Visi sebagai berikut :

**“Nusa Tenggara Timur Bangkit, Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia”**

2. MISI :

Untuk menjabarkan visi tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan 5 Misi sebagai langkah konkretisasi terhadap Visi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam melaksanakan program dan kegiatan secara fokus menjabarkan Misi yang ke-5 yaitu:

**“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik”**

3. TUJUAN DAN SASARAN :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT:

a) Tujuan

- Mewujudkan kebijakan dan program pengembangan *e-Government* (SPBE) di lingkup pemerintah Provinsi NTT yang lebih terarah, terukur, berkesinambungan dan selaras dengan RPJMD dan rencana strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk dalam rangka menjalankan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Membangun sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT yang komprehensif dan terintegrasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, kualitas layanan publik, mendukung terbentuknya sistem manajemen dan proses kerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

b) Sasaran

- Meningkatnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna.
- Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi.
- Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang komprehensif dan implementatif.

- Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan informasi dan komunikasi publik dalam mewujudkan peningkatan keterbukaan informasi publik.
- Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web.
- Meningkatnya penyebaran informasi publik.
- Tersedianya data statistik sektoral oleh Perangkat Daerah dalam mendukung perencanaan dan pembangunan daerah.
- Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui jaringan komunikasi dan informatika.
- Tercapainya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur yang profesional berbasis TIK.
- Tersedianya kapasitas SDM SPBE yang profesional.

Tabel. 5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kominfo

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatkan manajemen pemerintahan yang transparan, obyektif, akuntabel dan efisien berbasis TIK untuk memperlancar transaksi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan; | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keterbukaan informasi publik yang berbasis elektronik | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 45 | 50 | 80 | 85 | 90 |
| | | Jumlah PD yang memiliki website untuk Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi berbasis web | 39 OPD | 39 OPD | 39 OPD | 39 OPD | 39 OPD |
| | Meningkatnya layanan SPBE yang terintegrasi dan berorientasi kepada pengguna (layanan aplikasi) | Meningkatnya Indeks Penyelenggaraan SPBE | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| | Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE | Indeks Kematangan Keamanan Informasi Skor/Level | 0 | 52,48 | 61 | 76 | 90 |
| | Tersedianya infrastruktur SPBE yang terintegrasi | Terbangunnya jaringan LAN, Jaringan Intranet dan Jaringan Internet terintegrasi Pemerintah Provinsi NTT melalui Network Operation Center (NOC) | 25% | 30% | 35% | 75% | 100% |
| | Terwujudnya tata kelola keamanan informasi yang dalam mendukung penyelenggaraan SPBE | Indeks Keamanan Informasi Skor / Level | 0 | 52,48 | 61/ 3-3,9 | 76/ 4-4,9 | 90/ 5 |
| Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah | Ketersediaan Data Statistik Sektoral dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan infrastruktur pengembangan ekonomi masyarakat oleh Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

B. RENCANA KERJA (RKT) TAHUN 2023

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung terhadap arah kebijakan yang terkait dengan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik sebagaimana yang digariskan dalam RPJMD 2018 - 2023, dan merupakan acuan dasar dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel. 6

RENCANA KINERJA TAHUN 2023 (RKT 2023) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI | TARGET |
|----|---|--|---------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. | Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT. | 3,35 Index point | 2,7 Index point |
| | | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik. | 76,99 Skor | 77 Skor |
| | | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah. | 77,479 Skor | 79,078 Skor |
| | | Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi. | 100 % | |

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2023

1. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Berdasarkan RPJMD, RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas, maka disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, sebagai berikut :

Tabel. 7

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (PK 2023) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NTT

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI | TARGET | FORMULA INDIKATOR |
|----|---|--|---------------------|--------------------|---|
| | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. | Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT. | 3,35 Index point | 2,7 Index point | $\frac{\text{Nilai indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai indeks SPBE hasil evaluasi KemenpanRB pada tahun berjalan}} \times 100$ |
| | | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik. | 76,99 Skor | 77 Skor | $\frac{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai tingkat keterbukaan informasi publik hasil evaluasi KI Pusat pada tahun berjalan}} \times 100$ |
| | | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah. | 77,479 Skor | 79,078 Skor | $\frac{\text{Nilai tingkat pengamanan informasi daerah yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai tingkat pengamanan informasi daerah hasil evaluasi BSSN pada tahun berjalan}} \times 100$ |
| | | Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi. | 100 % | 100 % | $\frac{\text{Persentase layanan distribusi Intranet terintegrasi di PD yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Persentase layanan distribusi intranet terintegrasi di PD yang terealisasi pada tahun berjalan}} \times 100$ |

B. Pelaksanaan Anggaran

| | Uraian | Alokasi | Keterangan |
|----|--|-----------------------------|------------------------|
| 1) | APBD | | |
| | a) Belanja (program) | Rp. 13.590.100.235,- | Realisasi minimal 85 % |
| | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 7.335.135.315,- | Realisasi minimal 90 % |
| | 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 1,118.734.200,- | Realisasi minimal 85 % |
| | 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp. 5.100.090.720,- | Realisasi minimal 85 % |
| | 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi | Rp. 36.140.000,- | Realisasi minimal 85 % |
| | b) Pendapatan | Rp. 60.000.000,- | Realisasi minimal 90 % |
| 2) | APBN | | |
| | Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) | Rp. - | |
| | 1. - | Rp. - | |
| | Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan | Rp. - | Realisasi minimal 90 % |

- C. Menggunakan Aplikasi e-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);
- F. Rata-rata Realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%;
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP:
 - 1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80 %
 - 2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80 %
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah minimal 2 (dua) jenis;
- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);
- L. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah diatur tentang penyelenggaraan SAKIP yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan serta revidi dan evaluasi kinerja yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu.

Oleh karena itu semua instansi Pemerintah tak terkecuali Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya berkewajiban untuk melakukan pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan meliputi keberhasilan dan juga kegagalan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo sebagai berikut:

1. Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik;
3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah;
4. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

Terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.1. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

Tabel. 8
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

| No | IKU/Sasaran Strategis | Satuan | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian (%) |
|------------------|---|--------|----------------|-------------------|----------------|
| 1 | Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT . | Indeks | 2,7 | 3,83 | 100 |
| 2 | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik. | Skor | 77 | 77,06 | 100 |
| 3 | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah. | Skor | 79,078 | 79,078 | 100 |
| 4 | Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi. | % | 100 | 100 | 100 |
| Rata-rata | | | | | 100 |

A.2. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas dalam Periode RPJMD-P 2018 -2023

Tabel. 9
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas Tahun 2019 s/d 2023

| IKU/Sasaran Strategis | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|---|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | 2018 | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi |
| Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT | 1,26 Skor | 2,1 Indeks | 2,24 Indeks | 100% | 2,1 Indeks | 3,6 Indeks | 100% | 2,3 Indeks | 2,28 Indeks | 99,13% | 2,5 Indeks | 3,35 Indeks | 100% | 2,7 Indeks | 3,83 Indeks | 100% |
| Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 42,23 Skor | 45 Skor | 45 Skor | 100% | 59,65 Skor | 59,65 Skor | 100% | 80 Skor | 88,38 Skor | 100% | 85 Skor | 76,99 Skor | 90,58% | 77 Nilai | 77,06 Nilai | 100% |
| Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | - | - | - | - | 52,48 Skor | 52,48 Skor | 100% | 61 Skor | 68,01 Skor | 100% | 76 Skor | 77,479 Skor | 100% | 79,078 Skor | 79,078 Skor | 100% |
| Persentase sistem data dan statistik yang terintegrasi | Tidak Ada | - | - | - | - | - | - | 45% | 79,49 % | 100% | 75% | 100% | 100% | - | - | - |
| Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi | 0 | 35% | 35% | 100% | 50% | 17,95% | 35,90% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

A.3. Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

Tabel. 10
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas terhadap Sasaran/Target Nasional

| No. | Indikator | Realisasi 2023 | Sumber Data | IKU/Sasaran Strategis Diskominfo | Realisasi 2023 | Sumber Data |
|-----|---|----------------|---|---|----------------|---|
| 1. | Indeks SPBE Nasional | 2,79 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) | Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT | 3,83 | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) |
| | Indeks SPBE Kementerian Kominfo | 4,52 | | | | |
| 2. | Indeks Keterbukaan Informasi Publik Nasional | 75,40 | Hasil penilaian Komisi Informasi Pusat RI | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik. | 77,06 | Hasil penilaian Komisi Informasi Pusat RI |
| | Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kominfo | 96,09 | | | | |
| 3. | Global Cybersecurity Index (Indeks Keamanan Siber Global) | 94,88 | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah. | 79,078 | Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) |

A.4. Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama/Sasaran Strategis Dinas Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertindak sebagai *leading sector* dalam implementasi dan pelaksanaan evaluasi SPBE di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, berkolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait di lingkup Provinsi NTT telah mengikuti pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KemenpanRB.

Evaluasi/penilaian bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan SPBE pada setiap instansi pemerintah. Upaya peningkatan penerapan SPBE tidak sekadar dengan melakukan penilaian melainkan mendorong pengintegrasian dan keterpaduan dalam menerapkan SPBE itu sendiri. Dalam aspek layanan, diharapkan SPBE akan mempunyai satu *interoperability* dalam pelaksanaan aplikasi-aplikasi di seluruh Perangkat Daerah. Penilaian penerapan SPBE ini didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan evaluasi mandiri dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ketersediaan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 tergambar dari tercapainya indeks SPBE berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 dimana Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat nilai indeks sebesar 3,83 naik 1,13 poin dari target yang diperjanjikan. Jika disandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 0,48 poin atau peningkatan sebesar 14,33 %. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a) Kerja Kolaboratif masing-masing semua Sumber Daya yang ada di Dinas Kominfo.
- b) Sumber Daya Manusia (SDM) TIK yang ada di Perangkat Daerah mulai dioptimalkan terlibat dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan TIK.
- c) Aplikasi-aplikasi umum mulai diterapkan di semua Perangkat Daerah.
- d) Dinas Kominfo mengeluarkan regulasi terkait dengan fungsi monitoring, pengawasan dan evaluasi implementasi TIK.
- e) Adanya peningkatan kepatuhan dari perangkat daerah terkait dengan penanggungjawab pelaksanaan SPBE di Provinsi NTT.
- f) Masuknya beberapa aplikasi khusus didalam kontrak kinerja antara Gubernur NTT dengan Para eselon II terkait dengan penggunaan aplikasi srikandi untuk tatanaskah dinas elektronik.

2. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap badan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap badan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 dilaksanakan untuk menilai sejauh mana badan publik, khususnya badan publik negara, menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator KIP.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dengan Nomor:17/KEP/KIP/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik lingkup Pemerintah Provinsi NTT pada tahun 2023 menorehkan hasil yang cukup memuaskan dengan diperolehnya nilai tingkat Keterbukaan Informasi Publik sebesar 77,06 dengan predikat "cukup informatif", naik 0,6 poin dari target yang diperjanjikan. Jika disandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin atau peningkatan sebesar 0,09%. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a) Adanya dukungan Pimpinan dalam melaksanakan Monev SAQ (*Self Assessment Questionnaire*).
- b) Adanya forum komunikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi).
- c) Adanya media komunikasi berupa WA Grup sebagai tempat *sharing* informasi, diskusi dan bertanya apabila ada kendala.
- d) PPID Utama yang menjalankan fungsi kontrol dan monitoring yang baik.
- e) Tim PPID Utama menjemput bola ke Perangkat Daerah untuk pengampilan data SAQ.
- f) Adanya kerjasama dengan NGO (Non Governmental Organization) yaitu USAID ERAT untuk mendukung kegiatan Keterbukaan Informasi Publik.
- g) Adanya keaktifan website PPID Utama, PPID pelaksana, website nttprov dan media sosial masing-masing Perangkat Daerah dalam pemberitaan Program/Kegiatan untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik.

3. Tingkat Pengamanan Informasi Daerah

Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (PTKKSS) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) instrumen yaitu: Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI), *Cyber Security Maturity* (CSM), dan Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (Eval Paminfo) menggunakan teknik wawancara berdasarkan hasil *self-assessment* melalui instrumen yang telah diisi dan melakukan observasi terhadap implementasi pelaksanaan pengamanan informasi.

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatkan kapabilitas Pemerintah Daerah pada tahap tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi dan respons dalam menghadapi potensi ancaman keamanan data serta menguatkan implementasi keamanan SPBE di Indonesia. Serta sebagai upaya penentuan skala prioritas langkah dan penyiapan investasi dalam rangka menurunkan risiko keamanan siber pada Pemerintah Daerah.

Skor Indeks KAMI yang diperoleh tahun 2023 adalah 474 (Cukup Baik). Berdasarkan skor Indeks KAMI yang diperoleh, sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 8 dan 9 Tahun 2021, MAKA Diskominfo Provinsi NTT berhak mendapatkan sertifikat dan surat keterangan Indeks KAMI yang dikeluarkan oleh BSSN. Adapun kedua berkas tersebut telah teregistrasi, Surat Keterangan Indeks KAMI dengan nomor KET.1023/BSSN/D3/PS.02.02/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dan Sertifikat Indeks KAMI dengan nomor SERT.6869/BSSN/D3/PS.02.02/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil penilaian instrumen CSM didapatkan skor indeks kematangan sebesar 3,17 dan masuk ke dalam Level Kematangan Tingkat 3 yaitu menunjukkan bahwa dalam penerapan keamanan siber proses yang dilakukan sudah terorganisir dengan jelas, bersifat formal, dilakukan secara berulang, dilakukan reviu berkala, dan konsisten. Namun penerapan perubahan belum dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan keamanan siber pada level ini mulai dapat terukur dengan baik dan organisasi memiliki tingkat resiko siber yang tinggi.

Selanjutnya pada Evaluasi Persandian Tahun 2023 terdapat perubahan nama yang semula Evaluasi Pelaksanaan Persandian (Eval Laksan) berubah menjadi Evaluasi Pelaksanaan Pengamanan Informasi (Eval Paminfo) dengan instrument evaluasi yang telah disesuaikan dengan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala BSSN Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan atas dokumen, data dukung dan konfirmasi diperoleh hasil bahwa status Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Pengamanan Informasi T.A. 2023 yaitu “cukup” pada skor 79,078. Jika disandingkan dengan realisasi tahun 2022, nilai indeks mengalami kenaikan sebesar 1,599 poin atau peningkatan sebesar 2,06%. Maka dapat disimpulkan target yang diperjanjikan telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100 %.

Hal ini disebabkan oleh :

- a) Sebagian besar aspek penyelenggaraan persandian yang meliputi kebijakan, pengembangan SDM, penguatan konfigurasi sistem elektronik, layanan keamanan dan pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, dapat dilaksanakan sesuai standar teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Dukungan Pimpinan terhadap peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia), dapat dilihat dari adanya alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan SDM.
- c) Sudah ada peningkatan SDM.
- d) Pola hubungan komunikasi sandi melalui email sanapati yang menghubungkan Perangkat Daerah maupun Pemerintah Kab/Kota sampai saat ini masih berjalan.
- e) Pada area tata kelola sudah dilakukan reviu Pergub SMKI (Sistem Manajemen Keamanan Informasi).
- f) Pada area pengamanan elektronik, unit Persandian sudah melakukan indentifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap sistem elektronik lingkup Pemerintah Provinsi.

4. Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.

Untuk tercapainya indikator Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan 2 (dua) layanan yaitu :

- a) Layanan internet *dedicated* terhadap 34 Perangkat Daerah dan
- b) Layanan *video conference* Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Sekretaris Daerah, layanan terhadap 39 Perangkat Daerah dan NGO (Non-Governmental Organization) ataupun stakeholder lainnya.

Fasilitasi *video conference* yang disediakan bagi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan Bapak Sekretaris Daerah dan terhadap 39 Perangkat Daerah disediakan secara gratis, sedangkan fasilitasi *video conference* kepada NGO/stakeholder merupakan layanan yang menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Sepanjang Tahun 2023, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyediakan layanan internet *dedicated* bagi 34 Perangkat Daerah dengan total perangkat terpasang sebanyak 304 GPON dan 88 Ruckus, juga fasilitasi *video conference* bagi Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekretaris dan 39 Perangkat Daerah sebanyak 124 kali. Maka dapat disimpulkan target Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi sebagaimana yang tertuang di dalam RPJMD, RENSTRA, RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, telah terpenuhi dengan realisasi sebesar 100%.

Hal ini disebabkan oleh :

Pengembangan infrastruktur jaringan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan anggaran yang dialokasikan. Pembangunan tersebut dalam bentuk Pemasangan Jaringan Fiber Optik beserta dengan kelengkapan pendukungnya di 34 Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan UPTD Provinsi NTT yang berada di Kota Kupang. Sedangkan untuk layanan internet *video conference*, Dinas Komunikasi dan Informatika selalu menyiapkan dukungan internet, peralatan dan SDM yang akan menyediakan layanan *video conference*.

Layanan Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap seluruh Perangkat Daerah dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel. 11

Layanan Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

| No. | Nama Perangkat Daerah | Jenis Cakupan Layanan Internet | | Jumlah Aktivasi | |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| | | Layanan Internet Dedicated | Layanan Internet Video Conference | GPON | RUCKUS |
| 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 18 | 8 |
| | ▪ Sekolah Atlet SKO | | | 1 | |
| 2 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 7 | 4 |
| | ▪ UPT Pembibitan Produksi Tanam | | | 1 | |
| | ▪ Kantor PKH cabang Kab. Kupang | | | 1 | 1 |
| | ▪ Kantor PKH cabang Kota Kupang | | | 1 | |
| | ▪ UPT Pengolahan Limbah | | | 1 | |
| 3 | Dinas Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 8 | 3 |
| 4 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 3 | 2 |
| | ▪ UPT PPA | | | 1 | |
| | ▪ UPT PA | | | 1 | |
| 5 | Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 9 | |
| | ▪ UPT Latnakes | | | 2 | |
| | ▪ UPT Lapkes | | | 1 | |
| | ▪ UPT RSJ Naimata | | | 1 | |
| | ▪ Free Wifi | | | 1 | 1 |
| 6 | RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang | ✓ | ✓ | 1 | |
| 7 | Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 1 | 2 |
| 8 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 8 | 3 |
| | ▪ UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih | | | 1 | |
| | ▪ UPT Proteksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan | | | 2 | |
| | ▪ UPT Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikulturan | | | 1 | |
| | ▪ UPT Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan | | | 1 | |
| 9 | Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 6 | 3 |
| | ▪ UPT Pembibitan Ternak | | | 1 | |
| | ▪ UPT Veteneriner | | | 1 | |

| No. | Nama Perangkat Daerah | Jenis Cakupan Layanan Internet | | Jumlah Aktivasi | |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| | | Layanan Internet Dedicated | Layanan Internet Video Conference | GPON | RUCKUS |
| 10 | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 4 | 1 |
| 11 | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 14 | 5 |
| | ▪ Free wifi | | | 1 | 1 |
| 12 | Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 9 | 1 |
| | ▪ UPT LTSA P2TKI | | | 1 | |
| | ▪ UPT PLUT | | | 1 | |
| 13 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 4 | 1 |
| | ▪ UPT Perikanan Tenau | | | 1 | |
| | ▪ UPT Perikanan Oeba | | | 1 | |
| | ▪ Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan | | | 1 | |
| 14 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 2 | |
| 15 | Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 9 | 1 |
| | ▪ UPT Terminal Oebobo | | | | |
| 16 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 5 | 3 |
| | ▪ UPT GTA | | | 1 | |
| | ▪ Dekranasda | | | 2 | |
| 17 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
| 18 | Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 6 | 1 |
| | ▪ UPT Tuna Netra | | | 1 | |
| | ▪ UPT Panti Jompo | | | 1 | |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 8 | 4 |
| | ▪ Kantor PKK | | | 2 | |
| 20 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 3 | 1 |
| | ▪ UPT GOR Oepoi | | | 1 | 1 |
| | ▪ UPT Wisma Atlet | | | 1 | |
| 21 | Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 5 | 5 |
| 22 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 6 | 1 |

| No. | Nama Perangkat Daerah | Jenis Cakupan Layanan Internet | | Jumlah Aktivasi | |
|-----|---|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| | | Layanan Internet Dedicated | Layanan Internet Video Conference | GPON | RUCKUS |
| | ▪ Cabang Dinas ESDM Kota Kupang | | | 1 | |
| 23 | Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 10 | 4 |
| | ▪ Gedung Satu Data | | | 4 | 1 |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 5 | 2 |
| | ▪ Pusdalops | | | 1 | |
| 25 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 22 | 2 |
| 26 | Badan Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Timur | | ✓ | | |
| 27 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur | | ✓ | 6 | 4 |
| 28 | Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 3 | 1 |
| 29 | Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 19 | 1 |
| | ▪ Ruang Kerja Karo | | | 1 | |
| | ▪ Ruang Kerja Gubernur | | | 1 | 1 |
| | ▪ Ruang TU Gubernur | | | 1 | 1 |
| | ▪ Ruang Rapat Gubernur dan dan Wagub | | | | 1 |
| | ▪ Ruang Kerja Wagub | | | | 1 |
| | ▪ Ruang TU Wagub | | | | 1 |
| | ▪ Ruang Kerja Sekda | | | 1 | 1 |
| | ▪ Ruang TU Sekda | | | | 1 |
| | ▪ Ruang Rapat Sekda | | | 1 | 1 |
| | ▪ Ruang Asisten 1,2 , dan 3 | | | 3 | |
| | ▪ Ruang Rapat Asisten | | | 1 | 1 |
| | ▪ Ruang Kerja Staf Khusus | | | | 1 |
| | ▪ Ruang Kerja Staf Ahli | | | | 1 |
| | ▪ Smart Digital Corner | | | 1 | |
| | ▪ Perpustakaan Umum | | | 1 | |
| | ▪ Aula El Tari | | | 3 | 1 |
| | ▪ Rujab Gubernur | | | 4 | 2 |
| | ▪ Gedung Sasando (Aula Fernandez) | | | 2 | 1 |
| | ▪ Rujab Sekda | | | 1 | |
| 30 | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | | ✓ | | |
| 31 | Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | | ✓ | | |

| No. | Nama Perangkat Daerah | Jenis Cakupan Layanan Internet | | Jumlah Aktivasi | |
|------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| | | Layanan Internet Dedicated | Layanan Internet Video Conference | GPON | RUCKUS |
| 32 | Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur | | ✓ | | |
| 33 | Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 31 | |
| 34 | Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 2 | 1 |
| 35 | Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 3 | 1 |
| 36 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa | | ✓ | | |
| 37 | Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
| 38 | Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 1 | 1 |
| 39 | Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | ✓ | ✓ | 2 | 1 |
| Total Perangkat | | | | 304 | 88 |

A.5. Permasalahan dan Solusi

A.5.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai Sasaran - Sasaran Strategis yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. SDM TIK

Sampai saat ini kualitas dan kuantitas SDM masih menjadi salah satu faktor penting dalam pencapaian target kinerja utama di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika. Kuantitas dan kualitas SDM yang tidak memenuhi standar akan menghambat bahkan menjadi kendala dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas yang telah diisyaratkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 – 2023.

Ketersediaan SDM yang belum memadai disebabkan minimnya pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi dan komunikasi. Padahal pengembangan SDM harusnya menjadi salah satu prioritas dalam birokrasi saat ini apalagi di era digitalisasi seperti sekarang dimana ASN dituntut beradaptasi dengan pola kerja yang baru dengan meningkatkan kedisiplinan dan produktivitas serta memprioritaskan penggunaan teknologi.

SDM sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting memerlukan pemenuhan kebutuhan yang menjadi sumber motivasi dalam meningkatkan semangat kerja. Motivasi itu adalah dengan terpenuhinya gaji atau upah yang baik, pekerjaan yang aman, suasana kerja yang kondusif, penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan, pimpinan yang adil dan bijaksana serta insentif yang besarnya proporsional dan juga bersifat progresif. Sumber daya manusia seharusnya tidak dipandang sebagai objek yang harus digunakan secara produktif tanpa memperhitungkan kebutuhan dan keinginan mereka, dengan demikian kinerja ASN akan berada pada tingkat tertinggi (optimal) sesuai kemampuannya masing-masing.

2. Anggaran

Secara umum hambatan dan kendala pelaksanaan penggunaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti. Namun demikian, dengan adanya kebijakan anggaran yang menolak/menunda pengajuan Ganti Uang (GU) berakibat pada bergesernya jadwal pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang sudah ditentukan bahkan 82,39% belanja modal tidak dapat terealisasi.

Alokasi anggaran yang sangat minim dan inkonsistensi anggaran dalam pembiayaan program dan kegiatan mulai dari tahapan perencanaan sampai penganggaran mengakibatkan kebutuhan-kebutuhan yang merupakan prioritas bagi pencapaian indikator tidak teralokasikan seperti penyediaan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sebagai landasan utama didalam pengintegrasian berbagai layanan berbasis elektronik serta sarana dan prasarana yang sangat terbatas. Namun demikian, seluruh alokasi dana yang ada selalu diarahkan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

Adanya kebijakan prioritas alokasi anggaran menyebabkan pembayaran insentif/tunjangan sedikit terhambat/tertunda. Karena bagi mayoritas ASN uang masih merupakan motivasi utama dalam bekerja untuk mencapai kinerja yang lebih baik, maka sangat diharapkan peningkatan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan pemberian insentif akan mendorong ASN untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Insentif terkait erat dengan kinerja karyawan. Terdapat timbal balik dua arah antara pemberian insentif dengan kinerja. Insentif diberikan karena adanya kinerja yang baik dan diberikan untuk lebih meningkatkan kinerja lagi di masa mendatang.

3. Dukungan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT merupakan indikator Pemerintah Provinsi sehingga untuk pencapaiannya dibutuhkan dukungan dari 38 Perangkat Daerah lainnya. Regulasi sudah mengatur urusan wajib Kominfo yang dikonkurenkan dan diberikan kepada pemerintahan daerah yaitu e-Government atau SPBE dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta peran kominfo sebagai walidata di daerah. Namun dalam pelaksanaannya masing-masing Perangkat Daerah masih mengembangkan aplikasi secara parsial dan tidak terintegrasi, belum memenuhi standarisasi TIK serta adanya keengganan dari Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam mengirimkan data bahkan keengganan Perangkat Daerah dalam menaati regulasi yang telah dibuat.

A.5.2 Solusi

Terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan internal maupun eksternal, maka solusinya adalah sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan kepada setiap ASN untuk menyalurkan ide dan gagasan, memberi penghargaan serta meningkatkan SDM melalui pembinaan, pelatihan dan pendidikan (secara offline dan online);
2. Memprioritaskan alokasi anggaran yang ada untuk pencapaian indikator utama dan menjalin kerjasama dengan NGO (Non Governmental Organization) dalam hal mendapatkan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan serta membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal mendapatkan dukungan berupa sinkronisasi Program/Kegiatan, dukungan data dan informasi maupun kerjasama sebagai narasumber atau tenaga ahli;
3. Untuk meningkatkan dan mendorong kesadaran Perangkat Daerah maka sudah diupayakan dengan mengadakan pertemuan berkala dengan Perangkat Daerah, menyediakan wadah komunikasi bersama melalui grup-grup komunikasi serta mengeluarkan surat edaran/penegasan dari Sekretaris Daerah.

A.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PENGUNAAN SUMBER DAYA | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|---|--------------------------------|
| | | ANGGARAN | | SDM | SARANA/PRASARANA |
| | | APBD (Rp.) | P-APBD (Rp) | | |
| | TOTAL | 14.545.364.115 | 13.590.100.235 | 82 Pegawai | |
| 1.Realisasi Penyerapan Anggaran Minimal 85% | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 8.290.399.195,- | 7.335.135.315,- | 1. Sekretaris : 1 Orang | 1. SmartTV : 1 Unit |
| 2.Belanja menggunakan Aplikasi e-Purchasing minimal 40 % dari pagu belanja barang dan jasa | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.140.000,- | 62.140.000,- | 2. Perencana Ahli Muda : 1 Orang | 2. Komputer PC : 14 Unit |
| 3.Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 04 Februari 2023 | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.800.000,- | 30.800.000,- | 3. Kasubag Kepum : 1 Orang | 3. Laptop : 8 Unit |
| 4.Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB | Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.340.000,- | 31.340.000,- | 4. Kasubag Keuangan : 1 Orang | 4. Printer : 10 Unit |
| 5.Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90% | Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.112.061.280,- | 6.104.958.000,- | 5. Pranata Kearsipan : 1 Orang | 5. LCD : 2 Unit |
| 6.Persentase Tindak | Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.057.441.280,- | 6.050.338.000,- | 6. Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris : 1 Orang | 6. Harddisk Eksternal : 2 Unit |
| | Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 54.620.000,- | 54.620.000,- | 7. Pustakawan Ahli Muda : 1 Orang | 7. Layar Monitor : 1 Unit |
| | Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 8.733.000,- | 8.733.000,- | 8. Pengadministrasi Keuangan: 1 Orang | 8. CPU : 1 Unit |
| | | | | 9. Bendahara : 1 Orang | 9. Infocus+Layar : 2 Unit |
| | | | | 10. Bendahara Penerimaan : 1 Orang | 10. Spiker Aktiv : 4 Unit |
| | | | | 11. Pranata Humas Ahli Pertama : 1 Orang | 11. Mixer : 1 Unit |
| | | | | 12. Analis Kebijakan Ahli Muda : 1 Orang | 12. Wireless Mike : 2 Unit |
| | | | | 13. Penyusun Lap. Keuangan : 1 Orang | 13. Mike duduk : 6 Unit |
| | | | | 14. Analis Data dan Informasi : 1 Orang | 14. UPS : 4 Unit |
| | | | | 15. Pengadministrasi Umum : 4 Orang | 15. Scanner : 1 Unit |
| | | | | | 16. Kamera : 1 Unit |
| | | | | | 17. Tripot : 1 Unit |
| | | | | | 18. Kamera Drone : 1 Unit |
| | | | | | 19. Handycam : 1 Unit |
| | | | | | 20. Resiver CCTV : 1 Unit |

| INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PENGUNAAN SUMBER DAYA | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|---|------------------|
| | | ANGGARAN | | SDM | SARANA/PRASARANA |
| | | APBD (Rp.) | P-APBD (Rp) | | |
| <p>Lanjut Temuan BPK dan APIP, Administrasi 100%, Keuangan 80%</p> <p>7. Jumlah Inovasi minimal 2 (dua) jenis</p> <p>8. Pengelolaan tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023</p> <p>9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik</p> <p>10. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif</p> <p>11. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/ Pihak lain</p> | Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 8.733.000,- | 8.733.000,- | <p>16. Analis Publikasi : 1 Orang</p> <p>17. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana : 2 Orang</p> <p>18. Pengadministrasi Kepegawaian : 1 Orang</p> <p>19. Pengadministrasi Persuratan : 1 Orang</p> <p>20. Pramu Kebersihan : 2 Orang</p> <p>21. Pengemudi : 1 Orang</p> <p>22. Tenaga Administrasi : 4 Orang</p> <p>23. Tenaga Supir : 1 Orang</p> <p>24. Tenaga Kebersihan : 2 Orang</p> <p>25. Tenaga Security : 1 Orang</p> | |
| | Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah | 184.842.000,- | 184.850.800,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.235.500,- | 7.235.500,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 35.000.000,- | 35.640.800,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan/Material | 39.993.300,- | 39.993.300,- | | |
| | Sub Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.984.000,- | 15.984.000,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000,- | 75.000.000,- | | |
| | Sub Kegiatan: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 11.629.200,- | 10.997.200,- | | |
| | Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 26.101.650,- | 26.101.650,- | | |
| | Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26.101.650,- | 26.101.650,- | | |

| INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PENGUNAAN SUMBER DAYA | | | |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----|------------------|
| | | ANGGARAN | | SDM | SARANA/PRASARANA |
| | | APBD (Rp.) | P-APBD (Rp) | | |
| | | | | | |
| | Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 727.034.865,- | 733.374.465,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.993.200,- | 4.993.200,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 149.998.785,- | 149.998.785,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 572.042.880,- | 578.382.480,- | | |
| | Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 169.486.400,- | 214.977.400,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan | 99.996.400,- | 99.987.400,- | | |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.740.000,- | 57.260.000,- | | |
| | Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 29.750.000,- | 57.730.000,- | | |

| INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PENGUNAAN SUMBER DAYA | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------|---|---|
| | | ANGGARAN | | SDM | SARANA/PRASARANA |
| | | APBD (Rp.) | P-APBD (Rp) | | |
| Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 1.118.734.200,- | 1.118.734.200,- | 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Kasie Penge. Data dan Statistik Sektoral : 1 Orang 3. Pranata Humas Ahli Muda : 2 Orang 4. Analis Konten Media Sosial : 1 Orang 5. Analis Publikasi : 2 Orang 6. Pranata Humas Ahli Pertama: 1 Orang 7. Analis Data Standarisasi : 1 Orang 8. Tenaga Administrasi : 5 Orang 9. Tenaga Supir : 1 Orang | <u>Bidang PIKP :</u> 1. PC/Komputer : 9 Unit 2. Printer : 4 Unit 3. Laptop : 5 Unit 4. Kamera Shooting : 1 Unit 5. Monopod : 1 Unit 6. Kamera foto : 1 Unit 7. Flash Kamera : 1 Unit 8. Lensa Tele : 1 Unit 9. Memori Card 16 : 1 Unit 10. Baterai Cadangan camcorder : 1 Unit 11. UPS : 3 Unit 12. CPU : 1 Unit 13. Televisi : 2 Unit |
| | Kegiatan: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 1.118.734.200,- | 1.118.734.200,- | | |
| | Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 1.118.734.200,- | 1.118.734.200,- | | |
| ▪ Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT ▪ Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet Terintegrasi | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 5.100.090.720,- | 5.100.090.720,- | <u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 2 Orang 3. Pranata Humas Ahli Muda : 1 Orang 4. Analisi Penerapan Aplikasi dan Konten : 1 Orang 5. Pengadministrasi Umum : 1 Orang 6. Pengelola Database : 1 Orang 7. Pranata Komputer : 1 Orang 8. Pranata Humas Ahli Pertama : 1 Orang 9. Tenaga Administrasi : 2 Orang | <u>Bidang Layanan e-Government:</u> 1. Komputer/PC : 10 Unit 2. Printer : 2 Unit 3. UPS : 14 Unit 4. Printer : 1 Unit 5. Laptop : 2 Unit 6. Televisi : 1 Unit 7. Server : 3 Unit 8. HDD : 2 Unit 9. Stabilizer : 3 Unit 10. RAM Server : 2 Unit |
| | Kegiatan: Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 5.100.090.720,- | 5.100.090.720,- | | |
| | Sub Kegiatan: Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 5.100.090.720,- | 5.100.090.720,- | | |

| INDIKATOR KINERJA/ SASARAN STRATEGIS | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | PENGUNAAN SUMBER DAYA | | | |
|--|---|-----------------------|---------------------|---|---|
| | | ANGGARAN | | SDM | SARANA/PRASARANA |
| | | APBD (Rp.) | P-APBD (Rp) | | |
| | | | | <u>Bidang Pelayanan Infrastruktur :</u> 1. Kepala Bidang : 1 Orang 2. Pranata Komputer Ahli Muda : 1 Orang 3. Pengendali Teknologi Informasi : 1 Orang 4. Pengendali Jarg. Komunikasi : 1 Orang 5. Penyusun Standar Teknologi Informasi : 1 Orang 6. Pranata Humas Ahli Muda : 1 Orang 7. Pengadministrasi Umum : 2 Orang 8. Pengawas Teknologi Informasi : 1 Orang 9. Tenaga Administrasi : 2 Orang | <u>Bidang Pelayanan Infrastruktur:</u> 1. Laptop : 4 Unit 2. Printer : 1 Unit 3. PC/Komputer : 2 Unit 4. Layar Monitor : 1 Unit |
| Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 36.140.000,- | 36.140.000,- | 1. Manggala Informatika : 2 Orang 2. Analis Persandian : 2 Orang 3. Pranata Komputer Ahli Pertama : 1 Orang 4. Pengadministrasi Umum : 7 Orang 5. Pranata Komputer : 1 Orang 6. Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi : 1 Orang | 1. Laptop : 1 Unit 2. PC/Komputer : 3 Unit 3. UPS : 1 Unit 4. Printer : 2 Unit 5. HDD : 1 Unit 6. CPU : 1 Unit |
| | Kegiatan: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 36.140.000,- | 36.140.000,- | | |
| | Sub Kegiatan: Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 36.140.000,- | 36.140.000,- | | |

A.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

Untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran, dirumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai RPJMD, RENSTRA, RKT, dan PK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

Tabel. 13
Analisis Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran yang Menunjang Tercapainya Perjanjian Kinerja

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|---|-----------------|-----------------|---|----------------------------|------------------|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| | | | 13.590.100.235 | 13.590.100.235 | | | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif | 1. Realisasi Penyerapan Anggaran Minimal 85% 2. Belanja menggunakan Aplikasi e-Purchasing minimal 40 % dari pagu belanja barang dan jasa 3. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 04 Februari 2023 4. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB 5. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90% | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 8.290.399.195,- | 7.335.135.315,- | 1. Nilai pelaksanaan SAKIP 2. Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas | 1. BB Kategori 2. 100 % | Sekretariat |
| | | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.140.000,- | 62.140.000,- | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas | 20 Dokumen | |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.800.000,- | 30.800.000,- | 1. Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD | 1 Laporan | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|--|--|------------------------|------------------------|---|-------------------|------------------|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| | 6. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP, Administrasi 100%, Keuangan 80% | | | | 2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala (Bulanan, Triwulan, Tahunan) SKPD | 17 Laporan | |
| | 7. Jumlah Inovasi minimal 2 (dua) jenis | | | | 3. Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD | 1 Laporan | |
| | 8. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan melalui aplikasi Srikandi paling lambat Januari 2023 | | | | 4. Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah | 100% | |
| | 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik | | | | 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD | 1 Laporan | |
| | 10. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.340.000,- | 31.340.000,- | 1. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas | 100% | |
| | 11. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/ Pihak lain | | | | 2. Jumlah Laporan Evaluasi Berkala terhadap Kinerja ASN | 16 Laporan | |
| | | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 7.112.061.280,- | 6.104.958.000,- | Jumlah ASN Dinas Kominfo yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | 67 ASN x 12 Bulan | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 7.057.441.280,- | 6.050.338.000,- | Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan | 67 ASN x 12 Bulan | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|-------------------|--|----------------------|----------------------|--|------------|------------------|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| | | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 54.620.000,- | 54.620.000,- | 1. Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun | 17 Laporan | |
| | | | | | 2. Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa | 12 Laporan | |
| | | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 8.733.000,- | 8.733.000,- | Jumlah ASN yang berkinerja | 87 ASN | |
| | | Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 8.733.000,- | 8.733.000,- | Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi | 87 ASN | |
| | | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | 184.850.800,- | 184.850.800,- | Persentase layanan umum Perangkat Daerah yang Berkualitas | 100% | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.235.500,- | 7.235.500,- | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Paket | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.000.000,- | 35.640.800,- | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Paket | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|-------------------|--|---------------------|---------------------|--|-------------|------------------|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material | 39.993.300,- | 39.993.300,- | Jumlah paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor yang disediakan | 12 Paket | |
| | | Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu | 15.984.000,- | 15.984.000,- | Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 Laporan | |
| | | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000,- | 75.000.000,- | 1. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7 Laporan | |
| | | | | | 2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Rakor Bidang TIK | 1 Dokumen | |
| | | Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 11.629.200,- | 10.997.200,- | Jumlah Laporan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan SPBE | 1 Laporan | |
| | | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 26.101.650,- | 26.101.650,- | Persentase layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas | 100% | |
| | | Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26.101.650,- | 26.101.650,- | 1. Jumlah dukungan layanan virtual meeting yang disediakan | 1 Akun Zoom | |
| | | | | | 2. Jumlah peralatan komputer yang disediakan | 1 Unit | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|-------------------|---|----------------------|----------------------|--|--------------------|------------------|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| | | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 733.374.465,- | 733.374.465,- | Jumlah paket penyediaan jasa surat-menyurat, air, listrik, serta sewa hosting ntt.prov | 12 Paket | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.993.200,- | 4.993.200,- | Jumlah paket penyediaan jasa surat-menyurat | 12 Paket | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 149.998.785,- | 149.998.785,- | 1. Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia | 12 Paket | |
| | | | | | 2. Sewa hosting ntt.prov | 1 Tahun | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 572.042.800,- | 578.382.480,- | Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir | 19 PTT x 12 Bulan | |
| | | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 169.486.400,- | 214.977.400,- | Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah yang berkualitas | 100% | |
| | | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 99.987.400,- | 99.987.400,- | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, kebutuhan bahan bakar terpenuhi dan taat membayar pajak | 6 Unit x 12 Bulan | |
| | | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.740.00,- | 57.260.000,- | Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai | 60 Unit x 12 Bulan | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|---|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| | | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 29.750.000,- | 57.730.000,- | Jumlah Gedung Kantor dan Taman Kantor yang terpelihara | 2 Paket x 12 Bulan | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik - 77 Skor | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 1.118.734.200,- | 1.118.734.200,- | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 77 Skor | Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| | | Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 1.118.734.200,- | 1.118.734.200,- | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 77 Skor | |
| | | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 1.118.734.200,- | 1.118.734.200,- | 1. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik | 77 Skor | |
| | | | | | 2. Jumlah peserta Kegiatan Koordinasi PPID Utama dan Pembantu | 40 Orang x 1 Kegiatan | |
| | | | | | 3. Jumlah peserta Kegiatan Forum Komunikasi PPID | 40 Orang x 1 Kegiatan | |
| | | | | | 4. Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi KIM dan Desa Digital | 50 Orang x 1 Kabupaten | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|-----------------|-----------------|--|---------------------------|---|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| | | | | | 5. Kegiatan Rekrutmen Komisi Informasi | KI Terpilih | |
| | | | | | 6. Dana Operasional KPID dan KI yang tersedia | 2 Lembaga x 12 Bulan | |
| | | | | | 7. Jumlah peserta Kegiatan Bimtek/Workshop penyelenggaraan Statistik Sektoral | 40 Orang x 1 Kegiatan | |
| | | | | | 8. Persentase data sektoral pada Aplikasi Loppo daeri eNTT | 100% | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif | 1. Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT - 2,7 Indeks 2. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet teritegrasi - 100% | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 5.100.090.720,- | 5.100.090.720,- | 1. Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT 2. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet teritegrasi | 1. 2,7 Indeks 2. 100 % | 1. Bidang Layanan E-Government 2. Bidang Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------|-------------------|---|-----------------|-----------------|---|--|------------------|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| | | Kegiatan : Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 5.100.090.720,- | 5.100.090.720,- | 1. Indeks Evaluasi SPBE 2. Jumlah Website yang dikembangkan dan dikelola 3. Jumlah Bandwith Layanan Internet Dedicated 4. Jumlah PD yang terlayani Virtual Meeting | 1. 2,7 Indeks 2. 2 Website 3. 1.000 Mbps x 12 Bulan 4. 39 PD x 12 Bulan | |
| | | Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 5.100.090.720,- | 5.100.090.720,- | 1. Indeks Evaluasi SPBE | 2,7 Indeks | |
| | | | | | 2. Jumlah peserta Interview Evaluasi SPBE | 64 Orang x 1 Kegiatan | |
| | | | | | 3. Jumlah Website yang terintegrasi | 2 Website | |
| | | | | | 4. Persentase Pemeliharaan Aplikasi e-Absen | 100% | |
| | | | | | 5. Jumlah PD yang mendapat Layanan Virtual Meeting | 39 PD x 12 Bulan | |
| | | | | | 6. Jumlah Bandwith Layanan Internet Dedicated | 1.000 Mbps x 12 Bulan | |

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INPUT | | OUTPUT | | PENANGGUNG JAWAB |
|--|---|--|--------------|--------------|--|-------------|--|
| | | | APBD (Rp) | P-APBD (Rp.) | INDIKATOR | TARGET | |
| Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah - 79,078 Skor | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 36.140.000,- | 36.140.000,- | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | 79,078 Skor | Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi |
| | | Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 36.140.000,- | 36.140.000,- | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | 79,078 Skor | |
| | | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 36.140.000,- | 36.140.000,- | 1. Hasil Audit eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian | 79,078 Skor | |
| | | | | | 2. Jumlah Laporan Pengelolaan Webmail/Email Sanapati | 12 Laporan | |
| | | | | | 3. Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Sertifikasi Elektronik | 12 Laporan | |

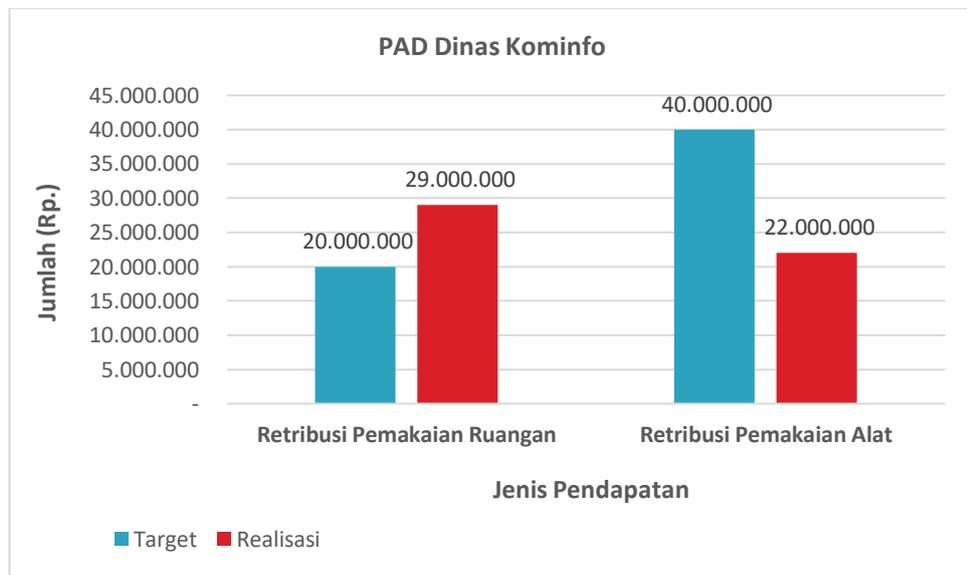
B. REALISASI PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

Akuntabilitas Keuangan / Dana sebagai salah satu sub dalam kelompok kinerja sasaran, yakni: Indikator Kinerja Input, digunakan untuk membiayai kegiatan baik pendapatan, maupun belanja. dalam rangka Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023. Keseluruhan Anggaran / Dana berasal dari APBD Provinsi NTT, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2023, yang dapat dilaporkan alokasi dan realisasinya sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Tabel. 14
Tabel Realisasi Pendapatan

| No | Jenis Pendapatan | Target (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Capaian (%) |
|----|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 60.000.000,- | 51.000.000,- | 85,00 |
| | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 60.000.000,- | 51.000.000,- | 85,00 |
| | - Retribusi Pemakaian Ruang | 20.000.000 | 29.000.000 | 145,00 |
| | - Retribusi Pemakaian Alat | 40.000.000 | 22.000.000 | 55,00 |



Gambar. 10
Target dan Realisasi Jenis PAD Dinas Kominfo

Obyek retribusi yang menjadi andalan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT adalah pemanfaatan ruangan aula pertemuan dan pemakaian peralatan TIK. Layanan Pemakaian Aula oleh Dinas Kominfo dilakukan berdasarkan surat permohonan yang diterima,

sedangkan untuk pemakaian Peralatan TIK dilayani pada Ruang Kerja Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah (berdasarkan permohonan yang diajukan) dan Masyarakat Umum (berdasarkan permohonan yang diajukan).

Pemakaian peralatan TIK pada Ruang Kerja Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Ruang Rapat Sekretaris Daerah intensitas penggunaannya tinggi namun tidak ditarik/dikenakan biaya, dengan semakin padatnya Kegiatan Rapat *Virtual* Bapak Pj. Gubernur dan Bapak Sekretaris Daerah serta semakin banyaknya permohonan penggunaan peralatan TIK, namun karena jumlah peralatan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika yang sangat terbatas mengakibatkan banyak permohonan penggunaan peralatan TIK yang tidak terlayani.

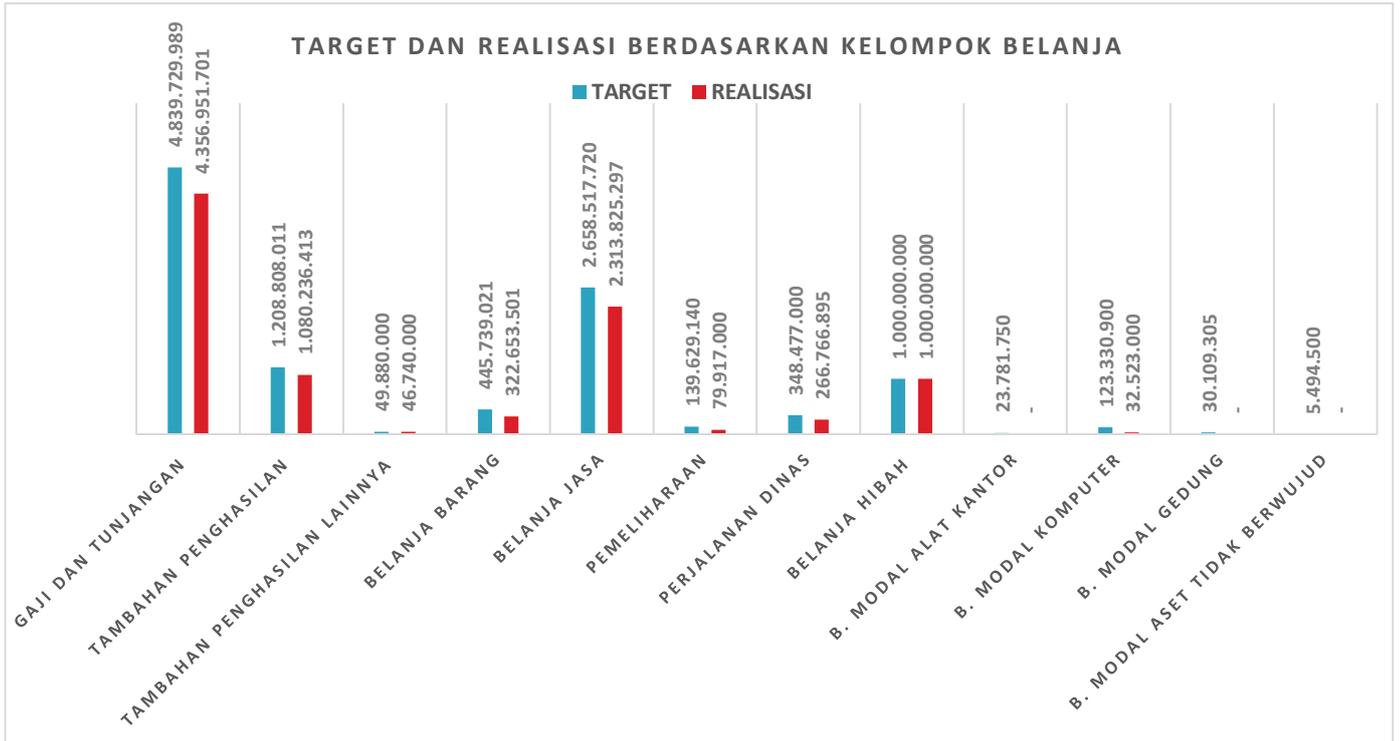
II. BELANJA

Tabel. 15

Tabel Realisasi Belanja Berdasarkan Kelompok Belanja

Realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja sebagai berikut :

| NO | KELOMPOK BELANJA | ALOKASI ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA ANGGARAN (Rp) | Capaian (%) |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|
| 1 | Belanja Operasi | 13.405.383.780,- | 12.629.786.049,- | 775.597.731,- | 94,21 |
| | 1.1 Belanja Pegawai | 6.098.418.000,- | 5.483.928.114,- | 614.489.886,- | 89,92 |
| | - Belanja Gaji dan Tunjangan | 4.839.729.989,- | 4.356.951.701,- | 428.778.288,- | 90,02 |
| | - Belanja Tambahan Penghasilan | 1.208.808.011,- | 1.080.236.413,- | 128.571.598,- | 89,36 |
| | - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | 49.880.000,- | 46.740.000,- | 3.140.000,- | 93,70 |
| | 1.2 Belanja Barang dan Jasa | 6.306.965.780,- | 6.145.857.935,- | 161.107.845,- | 97,45 |
| | - Belanja Barang | 445.739.021 | 322.653.501 | 123.085.520 | 72,39 |
| | - Belanja Jasa | 2.658.517.720 | 2.313.825.297 | 344.692.423 | 87,03 |
| | - Belanja Pemeliharaan | 139.629.140 | 79.917.000 | 59.712.140 | 57,24 |
| | - Belanja Perjalanan Dinas | 348.477.000 | 266.766.895 | 81.710.105 | 76,55 |
| | 1.3 Belanja Hibah | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 100 |
| | - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat Berbadan Hukum | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 | 100 |
| 2 | Belanja Modal | 184.716.455,- | 32.523.000,- | 152.193.455,- | 17,61 |
| | 2.1 Peralatan dan Mesin | 149.112.650,- | 32.523.000,- | 116.589.650,- | 21,81 |
| | - Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 23.781.750,- | 0 | 23.781.750,- | 0 |
| | - Belanja Modal Komputer | 123.330.900,- | 32.523.000,- | 92.807.900,- | 25,95 |
| | 2.2 Gedung dan Bangunan | 30.109.305,- | 0 | 30.109.305,- | 0 |
| | - Belanja Modal Bangunan Gedung | 30.109.305,- | 0 | 30.109.305,- | 0 |
| | 2.2 Modal Aset Tetap Lainnya | 5.494.500,- | 0 | 5.494.500,- | 0 |
| | - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 5.494.500,- | 0 | 5.494.500,- | 0 |
| | - BELANJA DAERAH | 13.590.100.235,- | 12.662.309.049,- | 927.791.186,- | 93,17 |



Gambar. 11
Target dan Realisasi Jenis Belanja Dinas Kominfo

Dari gambaran diatas, dapat tergambar realisasi penyerapan anggaran mencapai 93,17%, realisasi belanja operasi sebesar 94,21% dan realisasi belanja modal sebesar 17,61%. Tidak direalisasikan 7,59% belanja operasi dan 82,39% belanja modal karena adanya kebijakan anggaran yang diprioritaskan untuk Belanja Listrik, Air, Telp, dan Internet serta adanya kebijakan anggaran yang menolak/menunda pengajuan Ganti Uang (GU).

Tabel. 16

Tabel Realisasi Belanja Program/Kegiatan

Terhadap belanja Program dan Kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------|-------------|---|----------------------------|----------------------------|------------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | 13.590.100.235 | 12.662.309.049 | 93,17 | | | | 100 |
| 1. Realisasi Penyerapan Anggaran Minimal 85% 2. Belanja menggunakan Aplikasi e-Purchasing minimal 40 % dari pagu belanja barang dan jasa 3. Penyampaian LKPD, LPPD/LKPJ, LKIP paling lambat tanggal 04 Februari 2023 4. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB 5. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90% 6. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP, Administrasi 100%, Keuangan 80% 7. Jumlah Inovasi minimal 2 (dua) jenis | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 7.335.135.315 | 6.553.597.199 | 89,35 | 1. Nilai pelaksanaan SAKIP 2. Persentase terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang berkualitas | 1. BB Kategori 3. 100 % | 1. BB Kategori 2. 100 % | 1. 100 2. 100 |
| | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 62.140.000 | 45.342.000 | 72,97 | Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100 |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30.800.000 | 30.792.000 | 99,97 | 1. Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD 2. Jumlah Laporan Kinerja Berkala SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| | | | | | | 17 Laporan | 17 Laporan | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | | | | | | | |
| 8. Pengelolaan tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023 9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik 10. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik menuju Informatif 11. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain | | | | | 3. Jumlah Laporan Kinerja (LKIP) SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| | | | | | 4. Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 100 |
| | | | | | 5. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 31.340.000 | 14.550.000 | 46,43 | 1. Persentase pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | 2. Jumlah Laporan Evaluasi Berkala terhadap Kinerja ASN | 16 Laporan | 16 Laporan | 100 |
| | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.104.958.000 | 5.490.465.114 | 89,93 | Jumlah ASN Dinas Kominfo yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | 67 ASN x 12 Bulan | 67 ASN x 12 Bulan | 100 |
| | 6.050.338.000 | 5.438.568.114 | 89,89 | Jumlah ASN yang mendapat Gaji dan Tunjangan | 67 ASN x 12 Bulan | 63 ASN x 12 Bulan | 100 | |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|--------------------|--------------|--|------------|------------|-------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 54.620.000 | 51.897.000 | 95,01 | 1. Jumlah Laporan Keuangan Berkala dan Akhir Tahun | 17 Laporan | 17 Laporan | 100 |
| | | | | | 2. Jumlah Laporan Pengelolaan Belanja, Penerimaan dan Barang/Jasa | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 8.733.000 | 975.000 | 11,16 | Jumlah ASN yang berkinerja | 87 ASN | 87 ASN | 100 |
| | Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 8.733.000 | 975.000 | 11,16 | Jumlah ASN Dinas Kominfo yang berkompetensi | 87 ASN | 87 ASN | 100 |
| | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | 184.850.800 | 145.650.425 | 78,79 | Persentase layanan umum Perangkat Daerah yang Berkualitas | 100% | 100 % | 100 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.235.500 | 6.759.000 | 93,41 | Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 100 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 35.640.800 | 21.472.200 | 60,25 | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|---|------------|------------|-------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material | 39.993.300 | 31.061.200 | 77,67 | Jumlah paket alat/bahan kebersihan dan alat tulis kantor yang disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 100 |
| | Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu | 15.984.000 | 9.499.300 | 59,43 | Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 75.000.000 | 69.246.280 | 92,33 | 1. Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 7 Laporan | 7 Laporan | 100 |
| | | | | | 2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Rakor Bidang TIK | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| | Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 10.997.200 | 7.612.445 | 69,22 | Jumlah Laporan konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan SPBE | 1 Laporan | 1 Laporan | 100 |
| | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 26.101.650 | 26.046.150 | 99,79 | Persentase layanan pengadaan Barang Milik Daerah yang Berkualitas | 100% | 100 % | 100 |
| | Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 26.101.650 | 26.046.150 | 99,79 | 1. Jumlah dukungan layanan virtual meeting yang disediakan | 100% | 100 % | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|--------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | | | | 2. Jumlah peralatan komputer yang disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 100 |
| | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 733.374.465 | 722.045.955 | 98,46 | Jumlah paket penyediaan jasa surat-menyurat, air, listrik, serta sewa hosting ntt.prov | 12 Paket | 12 Paket | 100 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4.993.200 | 2.700.000 | 54,07 | Jumlah paket penyediaan jasa surat-menyurat | 12 Paket | 12 Paket | 100 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 149.998.785 | 144.103.076 | 96,07 | 1. Jumlah paket sumber daya komunikasi, air dan listrik yang tersedia | 12 Paket | 12 Paket | 100 |
| | | | | | 2. Sewa hosting ntt.prov | 1 Tahun | 1 Tahun | 100 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 578.382.480 | 575.242.879 | 99,46 | Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi, Kebersihan, Keamanan dan Supir | 19 PTT x 12 Bulan | 19 PTT x 12 Bulan | 100 |
| | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 214.977.400 | 123.072.555 | 57,25 | Persentase pemeliharaan Barang Milik daerah yang berkualitas | 100% | 100 % | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 99.987.400 | 89.670.955 | 89,68 | Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara, kebutuhan bahan bakar terpenuhi dan taat membayar pajak | 5 Unit x 12 Bulan | 5 Unit x 12 Bulan | 100 |
| | Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 57.260.000 | 17.158.000 | 29,97 | Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang layak pakai | 60 Unit x 12 Bulan | 18 Unit x 12 Bulan | 100 |
| | Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 57.730.000 | 16.243.600 | 28,14 | Jumlah Gedung Kantor dan Taman Kantor yang terpelihara | 2 Paket x 12 Bulan | 2 Paket x 12 Bulan | 100 |
| Tingkat Keterbukaan Informasi Publik - 77 Skor | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | 1.118.734.200 | 1.112.588.200 | 99,45 | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 77 Skor | 77,06 Skor | 100 |
| | Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi | 1.118.734.200 | 1.112.588.200 | 99,45 | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 77 Skor | 77,06 Skor | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|-------------------|--|----------------------|---------------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | 1.118.734.200 | 1.112.588.200 | 99,45 | 1. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik | 77 Skor | 77,06 Skor | 100 |
| | | | | | 2. Jumlah Laporan Pengelolaan Website PPID Utama | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| | | | | | 3. Jumlah peserta Kegiatan Koordinasi PPID Utama dan Pembantu | 40 Orang x 1 Kegiatan | 40 Orang x 1 Kegiatan | 100 |
| | | | | | 4. Jumlah peserta Kegiatan Forum Komunikasi PPID | 40 Orang x 1 Kegiatan | 40 Orang x 1 Kegiatan | 100 |
| | | | | | 5. Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi KIM dan Desa Digital | 50 Orang x 1 Kabupaten | 50 Orang x 1 Kabupaten | 100 |
| | | | | | 6. Kegiatan Rekrutmen Komisi Informasi | KI Terpilih | KI Terpilih | 100 |
| | | | | | 7. Dana Operasional KPID dan KI yang tersedia | 2 Lembaga x 12 Bulan | 2 Lembaga x 12 Bulan | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------|---|--|---|--------------------------------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | | | | 8. Jumlah peserta Kegiatan Bimtek/Workshop penyelenggaraan Statistik Sektoral | 40 Orang x 1 Kegiatan | 40 Orang x 1 Kegiatan | 100 |
| | | | | | 9. Persentase data sektoral pada Aplikasi Loppo daeri eNTT | 100% | 48,72 % | 48,72 |
| 1. Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT - 2,7 Indeks 2. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet teritegrasi 100% | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | 5.100.090.720 | 4.961.693.650 | 97,29 | 1. Indeks Penyelenggaraan (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT 2. Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi | 1. 2,7 Indeks 2. 100 % | 1. 3,83 Indeks 2. 100 % | 1. 100 2. 100 |
| | Kegiatan : Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi | 5.100.090.720 | 4.961.693.650 | 97,29 | 1. Indeks Evaluasi SPBE 2. Jumlah Website yang dikembangkan dan dikelola 3. Jumlah Bandwith Layanan Internet Dedicated 4. Jumlah PD yang terlayani Virtual Meeting | 1. 2,7 Indeks 2. 2 Website 3. 1.000 Mbps x 12 Bulan 4. 39 PD x 12 Bulan | 1. 3,83 Indeks 2. 2 Website 3. 1.000 Mbps x 12 Bulan 4. 39 PD x 12 Bulan | 1. 100 2. 100 3. 100 4. 100 |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|--|---|----------------------|-------------------|--------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan : | 5.100.090.720 | 4.961.693.650 | 97,29 | 1. Indeks Evaluasi SPBE | 2,7 Indeks | 3,83 Indeks | 100 |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 2. Jumlah peserta Interview Evaluasi SPBE | 64 Orang x 1 Kegiatan | 64 Orang x 1 Kegiatan | 100 |
| | | | | | 3. Jumlah Website yang terintegrasi | 2 Website | 2 Website | 100 |
| | | | | | 4. Persentase Pemeliharaan Aplikasi e-Absen | 100% | 100 % | 100 |
| | | | | | 5. Jumlah PD yang mendapat Layanan Virtual Meeting | 39 PD x 12 Bulan | 39 PD x 12 Bulan | 100 |
| | | | | | 6. Jumlah Bandwith Layanan Internet Dedicated | 1.000 Mbps x 12 Bulan | 1.000 Mbps x 12 Bulan | 100 |
| Tingkat Pengamanan Informasi Daerah - 79,078 Skor | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | 36.140.000 | 34.430.000 | 95,27 | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | 79,078 Skor | 79,078 Skor | 100 |
| | Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi | 36.140.000 | 34.430.000 | 95,27 | Tingkat Pengamanan Informasi Daerah | 79,078 Skor | 79,078 Skor | 100 |

| INDIKATOR KINERJA | PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET DAN REALISASI | | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | KEUANGAN | | | FISIK | | | |
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| | | | | | | | | |
| | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 36.140.000 | 34.430.000 | 95,27 | 1. Hasil Audit eksternal IKAMI, CSM dan Pelaksanaan Persandian | 79,078 Skor | 79,078 Skor | 100 |
| | | | | | 2. Jumlah Laporan Pengelolaan Webmail/Email Sanapati | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| | | | | | 3. Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Sertifikasi Elektronik | 12 Laporan | 12Laporan | 100 |

Dana yang digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal sesungguhnya sudah lebih fokus untuk dapat menyajikan seberapa besar tingkat capaian sasaran yang didasarkan pada tolok ukur kinerja. Dengan perkataan lain aspek keuangan yang disajikan dalam Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan gambaran sebagai data keuangan yang dikelola sesuai rencana / alokasi dana / anggaran pada program kegiatan serta realisasi pelaksanaan sesuai realisasi program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bertolak dari uraian - uraian pada bab - bab terdahulu, maka ada beberapa hal yang dibuat sebagai kesimpulan dari keseluruhan materi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kominfo Provinsi NTT ini sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian, telah sesuai dan merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program kerja seperti yang tercantum dalam P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, RENSTRA Perubahan Tahun 2018 – 2023, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
2. Kegiatan dapat berjalan dengan baik meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi;
3. Terbatasnya alokasi dana/anggaran tidak menyurutkan semangat Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memenuhi target yang telah diperjanjikan;
4. Dari Pengukuran/Penilaian yang dilakukan terhadap Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU), tingkat capaian mencapai 100% yang menunjukkan keberhasilan yang sangat memuaskan dan diharapkan akan semakin baik lagi di Tahun 2024.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka diajukan beberapa pemikiran sebagai berikut :

1. Dana

Perlunya dukungan dana dalam membiayai Program dan Kegiatan untuk mendukung pencapaian target – target dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023 dan Rencana Strategis Dinas Kominfo.

2. SDM

Untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karier. Peningkatan kualitas SDM dapat memanfaatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (*distance learning*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal juga peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/apresiasi kepada seluruh SDM yang secara aktif mengembangkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government. Hal ini hanya bisa terwujud jika ada dukungan dana yang memadai.

3. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, SDM, biaya, termasuk regulasi.

4. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

| Paraf Hierarki | |
|-----------------------------|--|
| Sekretaris Dinas Kominfo | |
| Perencana Ahli Muda | |
| Analisis Data dan Informasi | |

3. Komitmen pimpinan perangkat daerah

Untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka kesadaran setiap pimpinan Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan maupun pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur dan aplikasi antara lain dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, SDM, biaya, termasuk regulasi.

4. Pelaksanaan berbagai regulasi yang telah ditetapkan

Penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal, salah satunya karena masalah regulasi. Karena regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan ataupun mengontrol suatu kelompok maupun lembaga demi mencapai tujuan tertentu maka perlu adanya kesadaran untuk menaati setiap regulasi yang telah dibuat dan pemberian sanksi apabila ada Perangkat Daerah yang tidak menjalankan regulasi yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dan sebagai bahan pertimbangan Kebijakan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Frederik C. P. Koenunu, ST, M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19711115 200012 1 003

| Paraf Hierarki | |
|-----------------------------|--|
| Sekretaris Dinas Kominfo | |
| Perencana Ahli Muda | |
| Analisis Data dan Informasi | |



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Frederik C.P Koenunu, ST, M.H**

Jabatan : **Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ayodhia G. L. Kalake**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian targetkinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 7 Desember 2023

Pihak Kedua,

Ayodhia G. L. Kalake

Pihak Pertama,

Frederik C.P Koenunu, ST, M.H

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|--|
| Sekretaris Daerah | |
| Asisten Administrasi Umum | |
| Kepala Biro Organisasi | |

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------------|--|
| Sekretaris | |
| Kasubag Kepegawaian dan Umum | |

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI | | FORMULA INDIKATOR |
|----|---|--|---------------------|--------------------|--|
| | | | 2022 | TARGET 2023 | |
| 1. | Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif. | Indeks Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT. | 3,35 Index point | 2,7 Index point | 6 |
| | | Tingkat Keterbukaan Informasi Publik | 76,99 Skor | 77 Skor | $\text{Nilai Indeks SPBE yang direncanakan pada tahun berjalan} \times 100$ $\text{Nilai ketebukaan informasi publik hasil evaluasi KI Pusat pada tahun berjalan}$ |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | KONDISI | TARGET | FORMULA INDIKATOR |
|----|-------------------|--|-------------|-------------|---|
| | | | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Tingkat Penguamanan Informasi Daerah. | 77,479 Skor | 79,078 skor | $\frac{\text{Nilai Tingkat Penguamanan Informasi daerah yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Nilai Tingkat Penguamanan Informasi daerah hasil evaluasi BSSN pada tahun berjalan}} \times 100$ |
| | | Persentase Jaringan LAN dan jaringan intranet terintegrasi | 100 % | 100 % | $\frac{\text{Persentase layanan distribusi Intranet terintegrasi di PD yang direncanakan pada tahun berjalan}}{\text{Persentase layanan distribusi Intranet terintegrasi di PD yang terealisasi pada tahun berjalan}} \times 100$ |

B. Pelaksanaan Anggaran

| | Uraian | Alokasi | Keterangan |
|----|---|---------------------------|-----------------------|
| 1) | APBD | | |
| | a) Belanja (program) | Rp. 13,590.100.235 | Realisasi minimal 85% |
| | 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 7.335.135.315 | Realisasi minimal 90% |
| | 2. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik | Rp. 1.118.734.200,- | Realisasi minimal 85% |
| | 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Rp. 5.100.090.720,- | Realisasi minimal 85% |
| | 4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Penguamanan Informasi | Rp. 36.140.000,- | Realisasi minimal 85% |
| | b) Pendapatan | Rp. 60.000.000,- | Realisasi minimal 90% |
| | Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD) | Rp. 13.650.100.235 | Realisasi minimal 90% |
| 2) | APBN | | |

| Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan) | | | |
|--|------------|----------|----------|
| 1. Percepatan Pelaksanaan Pembangunan | Rp. | - | - |
| 2. Bina Administrasi Kewilayahan | Rp. | - | - |
| Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan | Rp. | - | - |

- C. Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Penyiapan IKPD, LKPD, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023;
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);
- F. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;
- G. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APSP sebagai berikut:
1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- H. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 2 (dua) jenis;
- I. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- J. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- K. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);

L. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

Kupang, 7 Desember 2023

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Ayodhia G. L. Kalake

| PARAF HIERARKI | |
|---------------------------|-----------|
| Sekretaris Daerah | <i>f</i> |
| Asisten Administrasi Umum | <i>af</i> |
| Kepala Biro Organisasi | <i>f</i> |

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Frederik P Koennu, ST, M.H

| PARAF HIERARKI | |
|------------------------------|----------|
| Sekretaris | <i>h</i> |
| Kasubag Kepegawaian dan Umum | <i>h</i> |